

**AUDIT KEPATUHAN PENGELOLAAN PIUTANG DALAM  
MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH**

**(Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk Cabang Makassar)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**I S M A W A T I**

**NIM 105730483114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**AUDIT KEPATUHAN PENGELOLAAN PIUTANG DALAM  
MEMINIMALISIR PIUTANG TAK TERTAGIH**

**(Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk Cabang Makassar)**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

Di susun dan diajukan oleh :

**I S M A W A T I  
105730483114**

Kepada :

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak dan ibu yang memberikan dorongan untuk menyelesaikan kuliah.
2. Bapak dosen pembimbing Hj. Naidah SE., M.Si dan Linda Arisanty Razak SE, M.Si, Ak.CA
3. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Para pembaca yang budiman.

## MOTTO

﴿ ٧ ﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama (Allah), Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

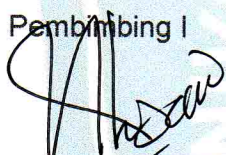
Judul Penelitian : "Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar)"

Nama Mahasiswa : ISMAWATI  
No. Stambuk/Nim : 105730483114  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu(S1) pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 di Fakultas Ekonomi & Bisnis Aula Mini Lt. 8 Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar, 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

  
**Hj. Naidah SE., M.Si**  
NIDN: 10026403

Pembimbing II

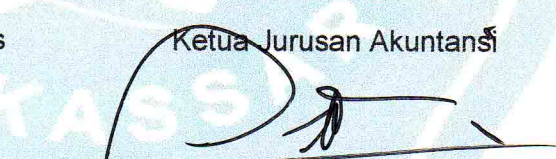
  
**Linda Arisanty Razak, SE., M.Si, Ak. CA**  
NIDN : 0920067702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
**Ismail Rasulong, SE., MM.**  
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


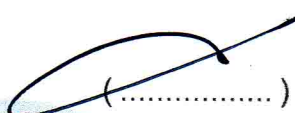
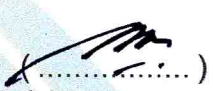

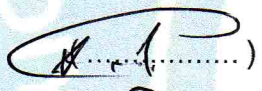

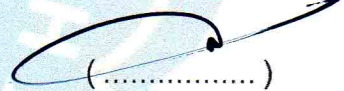
  
**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA, CSP**  
NBM: 107 3428

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas nama **ISMAWATI, NIM : 105730483114**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 123/ Tahun 1440 H/ 2018 M, Tanggal 22 Desember 2018 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM   
2. Faidhul Adzim, SE.,M.Si   
3. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA   
4. Ismail Rasulong, SE.,MM 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM : 903078**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAWATI  
Stambuk : 105730483114  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : "Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan,



**ISMAWATI**

Diketahui Oleh:

Dekan,

Ketua Prodi Akuntansi



**Ismail Rasufond, SE., MM**  
NBM. 903078

**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP**  
NBM. 107 3428

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul “Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Sakka dan ibu Hikmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudaraku satu satunya Boes yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekaligus selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
4. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
6. Ibu Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak.CA, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan semangat dalam kuliah.
7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.



9. Teman-teman Kelas Akuntansi 5 2014 yang selalu kompak dan belajar bersama, serta yang memberi banyak bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
10. Kepada Seluruh Staff karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar yang telah menerima penelitian ini dan membantu hingga penelitian ini selesai.
11. Seluruh Kakanda/Adinda IMMawan dan IMMawati di Pimpinan Komisariat (PIKOM) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Makassar, yang sudah saya anggap keluarga sendiri di rantauan, selalu memberikan ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis di dalam berorganisasi dan perkuliahan.
12. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabiilihaq, Fastabiqul Khairat.*

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Agustus 2018

Penulis

## ABSTRAK

ISMAWATI, 2018. **Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Naegara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar**, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hj. Naidah selaku Pembimbing I dan Linda Arisanty Razak selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan audit berbasis risiko, yaitu pendekatan audit dimana dilakukan pengecekan terhadap keselarasan antara kebijakan dan prosedur yang dilakukan dengan ketentuan regulasi. Jadi, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar harus sejalan dengan peraturan atau prosedur yang telah diadakan oleh Bank Indonesia (BI) dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Audit Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dalam hal pengelolaan piutang kepada nasabah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap tahapan tersebut tidak luput dari pengawasan Grup Kepatuhan agar setiap bagian atau seksi yang terkait pada tahapan tersebut bertanggung jawab secara profesional.

**Kata Kunci** : *Audit Kepatuhan, Piutang, piutang tak tertagih*

## ABSTRACT

ISMAWATI, 2018. **Compliance audit of the management of accounts receivable in the Receivables does not minimize the Collectible (a case study of PT Bank Naegara Indonesia (Persero) Tbk Makassar Branch**, Thesis Faculty of Economics majoring in accounting and business University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Hj. Naidah as a Supervisor I and Linda Arisanty Razak as Supervisor II.

This research aims to know the application of the compliance audit in the management of accounts receivable accounts receivable to minimise not collectible at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Branch. Methods of analysis used in this study is a qualitative method of analysis. In this case the researchers are using a risk-based audit approach, i.e. audit approach where checking is done against the harmony between the policy and the procedures are carried out with the provision of regulation. So, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Branch should be in line with regulations or procedures that have been held by Bank Indonesia (BI) in terms of financing.

Based on the results of the study, pointed out that Compliance Audits conducted by the Director of compliance and Compliance Work Unit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Makassar Branch has gone well in accordance with the duties and those powers and keep independensinya properly because it had working guidelines, systems and procedures of work refers to the provisions of the applicable legislation. As well as in terms of the management of accounts receivable to the customer were in accordance with the applicable procedures. Each of these stages did not escape from the supervision of the compliance group so that each part or section associated on the stage professionally responsible.

Keyword: Compliance Audit, accounts receivable, accounts receivable is not collectible

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7

<b>BAB II :TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Audit .....	8
B. Jenis-jenis Audit.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Audit.....	13
D. Norma Pelaksanaan Audit .....	15
E. Pengertian Audit Kepatuhan .....	17
F. Tujuan Audit kepatuhan .....	19
G. Kriteria Audit Kepatuhan .....	19
H. Pengertian Piutang .....	21
I. Klasifikasi piutang .....	21
J. Pengakuan Piutang Usaha .....	23
K. Pengertian Piutang Tak Tertagih .....	24
L. Jenis-jenis Piutang Tak Tertagih.....	25
M. Faktor-Faktor Piutang Tak Teratgih .....	25
N. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	29
O. Penelitian Terdahulu .....	31
P. Kerangka Konsep .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian .....	43
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	44

E. Pengumpulan data.....	45
F. Metode Analisis .....	46
G. Tehnik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian .....	54
C. Pembahasan .....	64
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	31
4.1 Daftar <i>Internal Control Questionnaire (ICQ) Audit Kepatuhan</i> Atas pengelolaan piutang .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konsep .....	42
4.1 Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar .....	49
4.2 <i>Flowchart</i> Pemberian kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian .....	71
2. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi .....	71
3. Poin-poin wawancara dan penjelasannya .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dana merupakan aspek penting bagi pemenuhan manusia yang mana dibutuhkan usaha lebih untuk memperolehnya. Kerja keras dan optimalisasi kerja terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini disebabkan karena dana bukan saja digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk memulai suatu aktivitas/tindakan. Dalam bisnis, pihak yang sangat merasakan kurangnya dana untuk menjalankan usaha adalah pengusaha kecil dan menengah. Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah dengan melakukan pinjaman/kredit kepada instansi atau lembaga keuangan seperti bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peran dalam intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta peran jasa-jasa bank lainnya. Aktivitas nyata dari perwujudan fungsi bank ini adalah dengan kegiatan pengumpulan dana melalui produk dalam bentuk simpanan yang secara umum digolongkan ke dalam tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan melalui mekanisme pemberian pinjaman/kredit.

Memasuki dekade industri jasa pembiayaan/perkreditan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut industri ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan yang sangat kompleks. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit tersebut terdapat berbagai prosedur yang mendasarinya.

Adapun prosedur-prosedur tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai proses jalannya permohonan kredit hingga sampai kredit tersebut dicairkan. Secara umum prosedur pemberian kredit meliputi: (a) Permohonan kredit; (b) Evaluasi atau analisis pemberian kredit; (c) Keputusan pemberian kredit; (d) Perjanjian kredit; dan (e) Pencairan kredit.

Kendala terbesar dari pemberian kredit adalah tingginya resiko piutang tak tertagih (*bad debt*) yang akan timbul dari pelayanan jasa keuangan, dimana hal tersebut akan menghambat kegiatan ekonomi/bisnis dari lembaga/perusahaan pembiayaan tersebut. Timbulnya piutang tak tertagih akan menyebabkan arus kas perusahaan menjadi tidak sehat yang berdampak terhadap profit dan kesehatan perusahaan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih baik faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor eksternal yang terjadi pada suatu perusahaan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara makro, sedangkan dari sisi internal dapat disebabkan oleh terjadinya pemisahan wewenang yang tidak tegas dari para pegawai, prosedur pemberian kredit yang tidak jelas, pegawai yang tidak kompeten, lemahnya system pengawasan dan lain sebagainya.

Piutang tak tertagih merupakan masalah yang dialami oleh semua lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman akibat dari suatu akad perjanjian dan tidak mungkin untuk menghilangkan masalah ini. Permasalahan piutang tak tertagih ini dapat timbul pada saat pertama kali diberikannya kredit, seperti dikarenakan sistem cairnya dana lebih cepat dari lembaga keuangan bank, yang menyebabkan *credit checking* kurang terkendali sehingga terjadi penyimpangan. Selain itu piutang tak tertagih

dapat disebabkan oleh kredit yang bermasalah ditengah masa perkreditan, misalnya seperti seorang debitur mendapatkan kesulitan keuangan sehingga pembayaran kewajiban atas kredit tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya, dan bisa juga diakibatkan bencana alam maupun suatu kejadian lainnya yang mana menghambat berjalannya proses bisnis debitur dan tentunya akan berdampak langsung kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur.

Penelitian yang dilakukan oleh Manik Cahyarini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Umur Piutang untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT Bisma Karaeng Pilang Surabaya, dengan mengetahui batas jatuh tempo pelunasan piutang usaha, maka harus dibuat analisis umur piutang yang akan digunakan untuk menghitung umur batas penagihan sehingga di dalam pelunasan piutang dapat diketahui mana yang masih menunggak, penentuan umur piutang adalah bilamana suatu piutang tidak dapat ditagih setelah melewati tanggal jatuh tempo maka akan terjadi resiko piutang tidak dibayar. Makin lama umur piutang yang tidak tertagih makin besar resiko piutang tersebut tidak terbayar. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anny Widiasmara (2014) yang berjudul Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih, dengan dilakukannya pengendalian intern terhadap piutang usaha, kualitas penagihan mengalami perbaikan terus menerus maka dapat meminimalkan piutang tak tertagihnya dan berhasil membukukan *profit* sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dari yang meliputi kegiatan penyaluran kredit

tersebut telah sesuai dengan prosedur-prosedur pemberian kredit maka perlu dilakukan audit kepatuhan/ketaatan. Audit kepatuhan/ketaatan ini sendiri berfungsi untuk menilai apakah kegiatan pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan dipatuhinya semua prosedur dari tata cara sistem pemberian kredit tersebut maka akan dapat menghindarkan dari kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun terjadinya kredit macet yang hingga sampai saat ini masih sering terjadi. Selain itu, audit kepatuhan/ketaatan ini juga dapat digunakan untuk menunjang terwujudnya efektivitas kegiatan pemberian kredit.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar adalah salah satu perusahaan BUMN terkemuka yang mendapatkan peringkat "sangat bagus" namun memiliki catatan kenaikan tingkat *bad debt* yang cukup tinggi setiap bulannya dilihat dari KPI (*Key Performance Indicator*) nasional perusahaan. Hal tersebut sangat mengganggu portfolio perusahaan. Untuk menyingkapi hal tersebut yang menjadi fokus dalam menangani piutang tak tertagih yaitu bukanlah bagaimana cara untuk menghilangkan piutang tak tertagih tersebut, akan tetapi mengarah kepada bagaimana cara memperkecil timbulnya piutang tak tertagih.

Audit kepatuhan dilaksanakan untuk mengadakan *review* secara sistematis terhadap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Objektivitas utama audit kepatuhan atas penerimaan kas dari piutang usaha adalah untuk menentukan apakah perusahaan telah menjalankan prosedur-prosedur yang terkait dengan pengiriman dan penerimaan kas sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu secara efisien dan efektif. Audit kepatuhan tidak

terbatas pada pemeriksaan ketaatan pelaksanaan sistem dan prosedur yang sudah ada, tetapi juga memberikan saran perbaikan bagi perusahaan yang diaudit. Semakin baik suatu sistem dan prosedur, maka akan semakin baik dalam menanggulangi piutang tak tertagih yang timbul dan sebaliknya jika sistem dan prosedur tersebut tidak baik, maka akan berdampak fatal terhadap piutang tak tertagih yang timbul. Sehingga dapat dilihat bahwa suatu sistem dan prosedur perusahaan akan sangat menentukan jalannya perusahaan. Sistem pengendalian piutang diharapkan banyak memberikan manfaat bagi suatu perusahaan pembiayaan dalam meminimalisasi *bad debt*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang audit kepatuhan pengelolaan piutang dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada perusahaan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan kondisi yang ada dalam dunia kerja.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak perusahaan, agar dijadikan sebagai kontribusi dan bahan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan agar dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan persiapan dan perbaikan sehubungan dengan adanya audit kepatuhan prosedur pengelolaan piutang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Audit

Menurut Agoes (2012:2) Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan klien. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dari berbagai definisi diatas, terdapat beberapa karakteristik dalam pengertian *auditing* yaitu:

1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan

Dalam proses pemeriksaan, harus ditetapkan kriteria-kriteria informasi yang diperlukan dan informasi tersebut dapat diverifikasi kebenarannya untuk dijadikan bukti audit yang kompeten.

2. Entitas Ekonomi (*Economy Entity*)

Proses pemeriksaan harus jelas dalam hal penetapan kesatuan ekonomi dan periode waktu yang diaudit. Kesatuan ekonomi ini sesuai dengan *Entity Theory* dalam Ilmu Akuntansi yang menguraikan posisi keuangan suatu perusahaan terpisah secara tegas dengan posisi keuangan pemilik perusahaan tersebut.



### 3. Aktivitas Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bahan Bukti

Proses pemeriksaan selalu mencakup aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dianggap kompeten dan relevan dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Diawali dari penentuan jumlah bukti yang diperlukan sampai pada proses evaluasi atau penilaian kelayakan informasi dalam pencapaian sasaran kegiatan audit.

### 4. Independensi dan Kompetensi Auditor Pelaksana

Auditor pelaksana harus mempunyai pengetahuan audit yang cukup. Pengetahuan (*knowledge*) itu penting untuk dapat memahami relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh. Selanjutnya informasi tersebut menjadi bukti yang kompeten dalam penentuan opini audit. Agar opini publik tidak biasa maka pihak auditor dituntut untuk bersikap bebas (*independen*) dari kepentingan manapun. Independensi adalah syarat utama agar laporan audit objektif.

### 5. Pelaporan Audit

Hasil aktivitas pemeriksaan adalah pelaporan pemeriksaan itu. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi auditor tadi dapat dimengerti maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Artinya laporan ini mampu menyampaikan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperoleh dan diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## B. Jenis – Jenis Audit

Agoes (2012:10) ditinjau dari luas pemeriksaannya, audit bisa dibedakan atas:

### a. Pemeriksaan umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Profesional Akuntan public dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, akurata etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

### b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.

Agoes (2012:11) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

a. *Management Audit(Operatinal Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

b. *Audit Kepatuhan (Compliance Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan Komisaris) maupun Pihak Eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bias dilakukan baik oleh KAP maupun bagian *Internal Audit*.

c. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP, internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.

Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

d. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi 4 jenis yaitu:

1. Auditor Ekstern

Auditor ekstern/ independent bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *financial audit*.

2. Auditor Intern

Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance audit*.

### 3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

### 4. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## C. Tujuan dan Manfaat Audit

Audit dikembangkan dan dilaksanakan karena audit memberi banyak manfaat bagi dunia bisnis. Pelaksanaan audit mempunyai tujuan yang berbeda, beberapa tujuan audit adalah:

### 1. Penilaian Pengendalian (*Appraisal of Control*)

Pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan.

### 2. Penilaian Kinerja (*Appraisal of Performance*)

Penilaian, Pelaksanaan dan Operasional serta hasilnya. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi-informasi kuantitatif lalu

melakukan penilaian efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

### 3. Membantu Manajemen ( *Assistance to Manajement* )

Dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performansinya. Dan hasilnya merupakan rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan yang diperlukan pihak manajemen.

Manfaat audit dikelompokkan menjadi tiga kelompok dasar yang menikmati manfaat audit, yaitu:

#### a. Bagi Pihak yang diaudit

1. Menambah Kredibilitas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain.
2. Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit.
3. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak yang diserahkan kepada Pemerintah.
4. Membuka pintu bagi masuknya sumber- pembiayaan dari luar.
5. Menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan.

#### b. Bagi anggota lain dalam dunia usaha

1. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit.

2. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan.
  3. Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen
  4. Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan.
  5. Memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian atau penggabungan perusahaan.
  6. Memberikan dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas atau rentabilitas perusahaan itu, efisiensi operasionalnya, dan keadaan keuangannya.
- c. Bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum
1. Memberikan tambahan kepastian yang independen tentang kecermatan dan keandalan laporan keuangan.
  2. Memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya.
  3. Memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial.

#### **D. Norma Pelaksanaan Audit**

Norma Pelaksanaan audit adalah pedoman bagi akuntan publik dalam menilai kualitas hasil pekerjaan dan mengukur tingkat tanggung jawab akuntan. Secara baku norma yang menjadi ukuran pekerjaan auditor tersebut ditetapkan oleh organisasi akuntan profesional, contohnya *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). GAAS mencakup mutu profesional akuntan publik dan pertimbangan dalam pelaksanaan dan pelaporan audit. GAAS terdiri dari:

##### a. Norma Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan telah menjalani latihan teknis yang cukup.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, auditor harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

##### b. Norma Pelaksanaan Audit

- 1) Audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus dipimpin dan diawasi dengan semestinya.
- 2) Sistem Pengendalian intern yang ada harus dipelajari dan dinilai dengan secukupnya untuk menentukan dapat/tidaknya sistem tersebut diandalkan sebagai dasar untuk menetapkan luasnya pengujian yang harus dilakukan serta prosedur audit yang digunakan.



- 3) Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan tanya jawab, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit.

c. Norma Pelaporan

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Laporan audit harus menyatakan apakah prinsip akuntansi dalam periode berjalan, telah dilaksanakan secara konsisten dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dengan laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
- 4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau memuat suatu penegasan bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus diberikan. Dalam hal auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Selain GAAS, juga ada Kode Etik Perilaku Profesional menurut AICPA yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Prinsip-prinsip etika adalah standar ideal dari perilaku etis yang dapat dicapai dalam terminologi filosofis.
2. Peraturan perilaku adalah peraturan jelas yang harus ditaati oleh semua akuntan publik yang menjalankan praktek akuntansi publik.
3. Interpretasi Peraturan Perilaku, tidak merupakan keharusan tetapi para praktisi harus memahaminya.

4. Ketetapan Etika adalah penjelasan yang dikeluarkan oleh komisi pelaksana dari divisi etika professional mengenai beberapa situasi nyata yang khusus.

#### **E. Pengertian Audit Kepatuhan**

Menurut Agoes (2012:14) mendefenisikan bahwa Compliance Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Audit Kepatuhan untuk mengetahui dan menilai atau menguji apakah prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik itu yang dibuat oleh pihak internal maupun eksternal yang dari pihak berwenang sudah ditaati oleh setiap entitas pada suatu organisasi atau perusahaan.

Audit kepatuhan dilakukan dengan cara:

##### 1) Pengujian adanya kepatuhan

Pengujian tersebut dapat diketahui dengan ada atau tidaknya informasi mengenai struktur pengendalian yang dikumpulkan auditor. Pengujian dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengujian transaksi dengan mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu.  
Pengujian ini membuktikan adanya kepatuhan dan pengendalian intern dalam pelaksanaan transaksi awal hingga transaksi selesai.
- b. Pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat.

Pengujian ini dilakukan dengan memilih salah satu transaksi tertentu kemudian mengikuti pelaksanaan dari awal hingga selesai melalui dokumen yang dibuat dalam transaksi serta pencatatan.

## 2) Pengujian dalam tingkat kepatuhan

Auditor tidak hanya berkepentingan dengan eksistensi pengendalian internal, tetapi juga berkepentingan pada kepatuhan klien terhadap pengendalian internal. Prosedurnya adalah:

- a. Sampel diambil dari dokumen populasi, lalu memeriksa dokumen pendukungnya. Tujuannya untuk dapat kepastian bahwa dokumen telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pengujian substansi, pengujian ini mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan menilai kewajaran informasi pada laporan keuangan.

## F. Tujuan Audit Kepatuhan

Menurut Mulyadi (2010:32) tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atas perusahaan tertentu.

Dalam penjelasan Agoes (2012:14) menyatakan bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit kepatuhan yaitu:

1. Menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam suatu organisasi dan perusahaan.

2. Meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang diterapkan didalam suatu organisasi dan perusahaan.
3. Meningkatkan kinerja organisasi dan perusahaan.

#### **G. Kriteria Audit Kepatuhan**

Kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit kepatuhan, misalnya adalah kebijakan, peraturan, persyaratan, pinjaman kredit, prosedur yang ditetapkan. Informasi terukur dalam audit kepatuhan seperti data mengenai pelaksanaan kebijakan, peraturan, prosedur, pemberhentian pegawai, pelaporan SPT pajak dan pelaksanaannya.

Kriteria audit kepatuhan dibagi menjadi 2 yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal.

##### **a. Kriteria internal**

Kriteria internal adalah peraturan-peraturan yang berasal dari organisasi dan perusahaan itu sendiri. Kriteria internal antara lain:

1. Kode etik perusahaan
2. Peraturan perusahaan
3. Kebijakan-kebijakan perusahaan
4. Prosedur perusahaan

##### **b. Kriteria eksternal**

Kriteria eksternal adalah kriteria yang merupakan standar yang berlaku secara umum dan bukan merupakan kebijakandari organisasi tersebut.

Kriteria eksternal dapat berupa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
2. Undang-Undang yang mengatur tentang operasional organisasi

Ada tiga kriteria dalam *compliance audit* antara lain:

1. Peraturan atau undang-undang yang diterapkan oleh instansi pemerintah atau badan atau lembaga yang terkait.
2. Kebijakan atau sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen organisasi.
3. Selain internal auditor, *compliance audit* juga bias dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB).

#### **H. Pengertian Piutang**

Menurut Agoes (2012:192) piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit.

Tujuan utama dalam penjualan secara kredit atau pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk mengembalikan atau melunasi kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga bagi perusahaan akan timbul suatu piutang. Piutang tersebut merupakan suatu klaim yang dimiliki oleh perusahaan untuk menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva kepada pihak debitur.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain atas pemberian barang, jasa atau fasilitas lainnya secara kredit.

## I. Klasifikasi Piutang

Pengelompokkan piutang dapat didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu berdasarkan asal transaksinya, bentuk dan jatuh temponya. Menurut Dedhy dan Yie Ke (2010), klasifikasi piutang adalah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan asal transaksi

- 1) Piutang usaha adalah piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan produk perusahaan dengan pembayaran beberapa waktu setelah penyerahan barang.
- 2) Piutang lainnya adalah piutang yang bukan berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa utama perusahaan, misalnya:
  - a) Piutang kepada karyawan, direksi atau pemegang saham;
  - b) Piutang deviden hasil investasi atau piutang deviden dari anak perusahaan;
  - c) Piutang kepada anak/induk perusahaan;
  - d) Dan sebagainya.

### b. Berdasarkan bentuk

- 1) Piutang tanpa janji tertulis adalah pemberian yang secara formal atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis dan penagihan piutang berdasarkan bukti transaksi berupa *invoice/faktur*
- 2) Piutang dengan janji tertulis (*piutang weseł*) merupakan yang memiliki kekuatan hukum karena disertai dengan janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan.

c. Berdasarkan jatuh tempo

- 1) Piutang jangka pendek adalah piutang yang jatuh temponya kurang dari satu periode akuntansi atau siklus operasi normal, tergantung mana yang lebih panjang
- 2) Piutang jangka panjang merupakan piutang yang jatuh temponya tidak termasuk dalam piutang jangka pendek.

Sedangkan menurut PSAK No.9 piutang diklasifikasikan sebagai berikut: Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

Dari pengertian pengelompokan piutang diatas dapat disimpulkan bahwa piutang yang timbul dari pemberian kredit atau penjualan secara kredit merupakan piutang usaha, karena piutang tersebut timbul dari kegiatan normal perusahaan meskipun waktu tertagihnya dapat lebih dari satu tahun namun waktu tersebut merupakan siklus normal dari operasi perusahaan.

## **J. Pengakuan Piutang Usaha**

Pada saat perusahaan melakukan penjualan dan belum menerima kas sebagai hasil penjualan maka akan timbul suatu piutang usaha. Dalam transaksi bisnis yang berlaku umum, untuk mendapatkan pembayaran yang

cepat atas piutang usaha biasanya penjual memberikan penawaran potongan penjualan (diskon) pada para pelanggan. Misalnya dengan memberikan penawaran diskon sebesar 5% jika membayar kurang dari 10 hari sejak tanggal transaksi dengan masa jatuh tempo 30 hari sejak tanggal transaksi.

Pencatatan diskon dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode bersih (*net method*) dan metode bruto (*gross method*).

1. *Net method* digunakan untuk mencatat piutang usaha senilai harga penjualan dikurangi diskon yang disepakati dengan asumsi pelanggan pasti akan membayar dalam periode diskon.
2. *Gross method* digunakan untuk mencatat diskon ketika pembayaran benar-benar telah terjadi pada periode diskon.

Selain diskon atas pembayaran (*cash discount*) terdapat juga *trade discount* yaitu diskon yang nilainya langsung dipotongkan pada harga jual dengan tujuan adanya peningkatan volume penjualan.

Menurut PSAK No.9 piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diargukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.

#### **K. Pengertian Piutang Tak Tertagih**

Adanya piutang dalam kegiatan perusahaan memungkinkan terjadinya keadaan dimana piutang tersebut tidak dilunasi (*bad debt*). Perusahaan akan sangat dirugikan oleh adanya piutang tak tertagih. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan diharapkan menetapkan suatu kebijakan atas masalah piutang tidak tertagih.



Volume penjualan yang cukup tinggi akan menimbulkan peningkatan piutang, sehingga resiko terjadinya kemacetan atas kerugian pendapatan piutang tersebut (piutang tak tertagih) akan lebih tinggi dan nilai total aktiva lancar dalam neraca, sehingga aktiva lancar yang digunakan untuk menghitung tingkat laba perusahaan akan lebih besar dengan meningkatnya piutang tak tertagih tersebut. Suatu piutang yang tidak dapat ditagih merupakan kegiatan pendapatan yang memerlukan ayat pencatatan yang tepat dalam penurunan perkiraan piutang, penurunan laba, dan ekuitas perusahaan.

Piutang tak tertagih ini biasanya oleh pihak perusahaan menetapkan persentase tertentu untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Biasanya pengenaan persentasenya ditentukan berdasarkan umur piutang tersebut dan berdasarkan pengalaman periode yang lalu.

Proses memcairkan piutang untuk menjadi kas perusahaan, diperlukannya sistem yang memadai sehingga diharapkan semua piutang dapat tertagih. Jika jumlah piutang tidak tertagih perusahaan cukup besar, maka hal ini akan mengurangi bentuk piutang yang terealisasi dan akan tentu dapat merugikan perusahaan.

#### **L. Jenis-jenis Piutang TakTertagih**

Jenis-jenis piutang tak tertagih diantaranya:

1. Kredit dalam perhatian khusus

Merupakan status kolektibilitas yang tergolong *performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlamabatan membayar debitur dengan lama

tunggakan 1-90 hari sejak tanggal jatuh tempo

2. Kredit kurang lancar

Merupakan status kolektibilitas keterlamabatan membayar debitur dengan lama tunggakan 91-120 hari

3. Kredit diragukan

Merupakan status kolektibilitas keterlamabatan membayar debitur dengan lama tunggakan 121-180 hari

4. Kredit macet.

Merupakan status kolektibilitas keterlamabatan membayar debitur dengan lama tunggakan >180 hari

#### **M. Faktor-faktor Piutang Tak Tertagih**

Hampir setiap perusahaan pernah mengalami masalah piutang tak tertagih. Gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh:

1. Menurunnya Pendapatan Bersih

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh adanya kenaikan biaya yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang tinggi.

2. Menurunnya Penjualan secara Tajam

Penjualan yang menurun adalah hal yang wajar dalam siklus hidup perusahaan, tetapi jika penjualan tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam, maka hal ini menandakan bahwa perusahaan akan menemui titik kritis.

3. Menurunnya Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepataannya menurun

berarti banyak barang yang tidak laku, seperti perusahaan diambang kesulitan dalam melakukan pemasaran produknya.

4. Meningkanya Penjualan secara Tajam

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai uang secara cepat sehingga perusahaan melakukan penjualan produknya dengan harga jual dibawah harga pokok.

5. Menurunnya Perputaran Piutang

Lambannya proses pelunasan pelanggan dan sulitnya penagihan akan menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya.

6. Menurunnya Modal Lancar

Turunnya modal lancar dapat disebabkan oleh pembelian kredit, membengkaknya hutang kepada pihak ketiga atau mungkin disebabkan adanya pemborosan.

7. Nasabah mulai ingkar janji

8. Nasabah membuat laporan fiktif

9. Nasabah tidak terbuka

10. Nasabah menolak wawancara

Menurut Rivai, dkk (2013), kredit macet atau piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur. Faktor-

faktor tersebut diantaranya:

- a. Keteledoran dari pihak kreditur mematuhi persetujuan pemberian piutang yang telah ditegaskan.
- b. Terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak

ada patokan yang jelas tentang standar kekayaan.

- c. Konsentrasi piutang pada sekelompok pengguna jasa atau sektor usaha yang beresiko tinggi.
  - d. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian piutang.
  - e. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepala para eksekutif dan staf bagian piutang.
  - f. Lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur lama.
2. Faktor Eksternal,yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur.
- Faktor-faktor tersebut diantaranya:
- a. Menurunnya kondisi ekonomi perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
  - b. Adanya salah arus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam bidang usaha yang ditangani.
  - c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan,pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur.
  - d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
  - e. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
  - f. Watak buruk debitur (yang semula memang merencanakan tidak

akan melunasi piutangnya).

Penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor-faktor intern, adalah faktor-faktor yang ada dalam diri perusahaan sendiri. Dari segi managerial faktor terjadinya kredit macet disebabkan oleh:
  - a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan pengeluaran
  - b. Tidak efektifnya control atas biaya dan pengeluaran
  - c. Kebijaksanaan tentang kebijakan piutang yang tidak efektif
  - d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap
  - e. Permodalan yang tidak cukup
2. Faktor-faktor ekstern, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, diantaranya:
  - a. Bencana alam, adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya: kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, banjir dll.
  - b. Peperangan, merupakan pengrusakan dari akibat permasalahan, misalnya: demonstrasi, pembakaran, dll.
  - c. Perubahan kondisi perekonomian, merupakan peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang.
  - d. Perubahan teknologi, semakin majunya teknologi maka semakin efisien barang yang diproduksi sehingga perusahaan yang tidak menggunakan teknologi modern akan kalah bersaing.

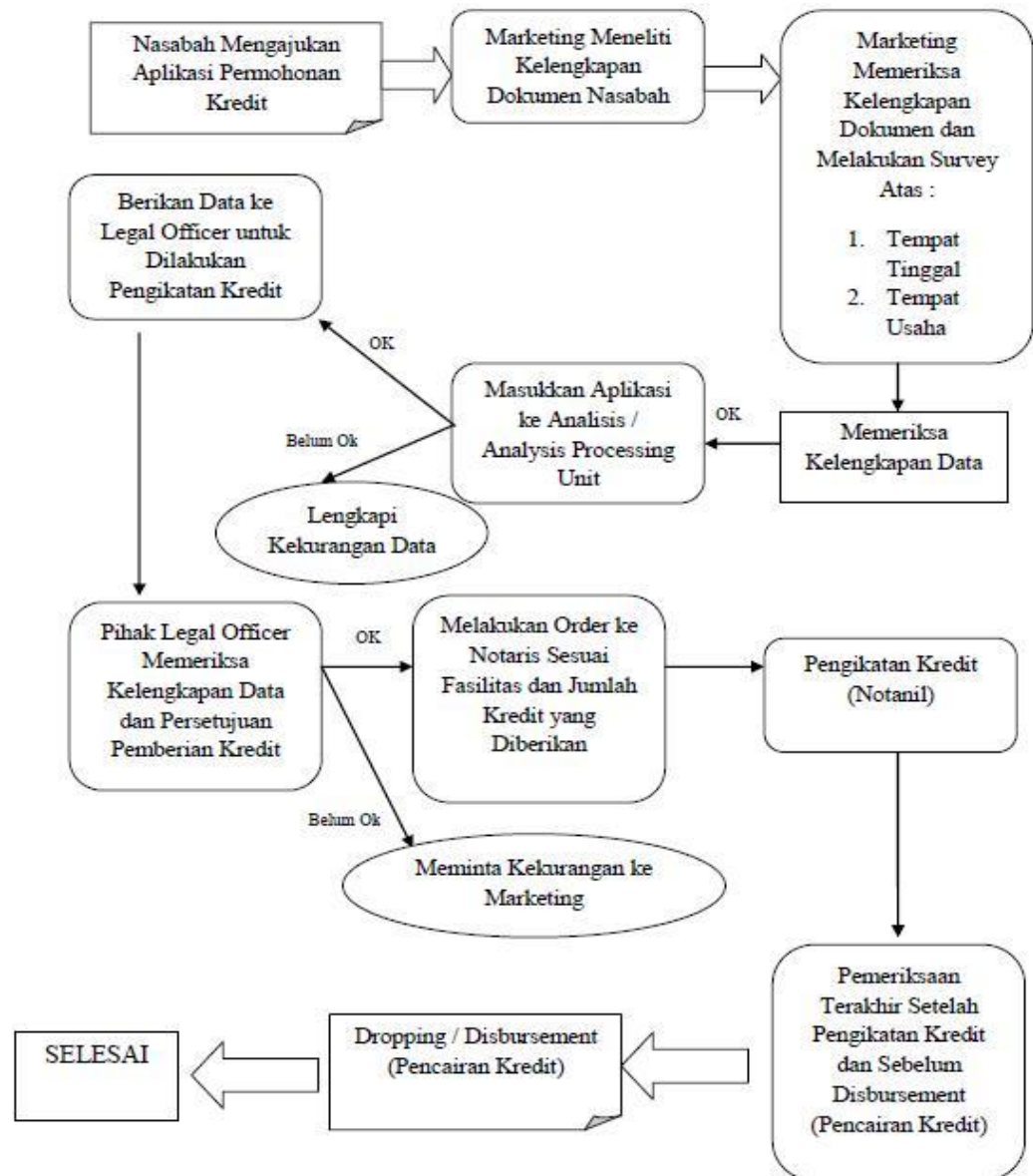
#### **N. Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Penyelesaian kredit bermasalah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut, (Rivai,dkk 2013:242-262):

1. Terhadap debitur yang dipandang masih mempunyai prospek dan debitur masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan kredit antara lain dapat dilakukan melalui cara:
  - a. Penagihan intensif oleh kreditur
  - b. *Rescheduling*, adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu.
  - c. *Reconditioning*, adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit.
  - d. *Restructuring*, adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit.
  - e. *Management Assistancy*, adalah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan kreditur kepada debitur yang masih mempunyai prospek dan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan salah satu petugas kreditur maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.
2. Terhadap debitur yang dipandang kurang mempunyai prospek dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui cara:

- a. Novasi, adalah perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.
  - b. Kompensasi, adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang atau pihak masing-masing merupakan nasabah satu terhadap lainnya.
  - c. Likuidasi, adalah penjualan barang jaminan debitur untuk melunasi utang kepada bank, baik dilakukan oleh debitur yang bersangkutan maupun oleh pemilik jaminan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank.
  - d. Subrogasi, adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran utang nasabah oleh pihak ketiga tersebut kepada bank yang dimaksud.
  - e. Penebusan Jaminan, adalah penarikan jaminan dari bank oleh nasabah atau pemilik jaminan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.
3. Terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek, namun masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, ongkos-ongkos.
  4. Terdapat debitur yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyelesaian kreditnya dapat ditempuh melalui pihak ketiga (Pengadilan Negeri).
  5. Terdapat debitur kredit kecil yang sudah tidak mempunyai prospek dan masih mempunyai prospek, namun tidak memenuhi kewajibannya,

penagihan dilakukan oleh kreditur secara intensif.



**Gambar 4.2**

**Flowchart Prosedur Pemberian kredit Pada PT Bank Nasional Indonesia (persero) tbk. Cabang Makassar**



Prosedur pemberian Kredit yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar

1. Calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit tertulis untuk memperoleh kredit usaha rakyat kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dengan dilengkapi persyaratan – persyaratan yang diperlukan seperti riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, dan jaminan kredit.
2. Marketing meneliti kelengkapan dokumen nasabah yang telah diajukan kepada pihak bank untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar. Atas dasar permohonan tersebut, bagian marketing melakukan survey atau mencari informasi tentang calon debitur, baik dengan melakukan peninjauan langsung ketempat tinggal atau ketempat usaha dengan tujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan yang ditulis diproposal. Setelah dilakukan survey tersebut, kembali dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, lalu dimasukkan aplikasi ke bagian analisa agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar. Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan pokok dari analisa kredit yang merupakan suatu pendapat dan saran.
4. Disetujui atau ditolaknya permohonan atas kredit diputuskan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar atas dasar hasil

aplikasi yang disampaikan dengan didukung oleh analisa atas data yang ada di BNI.

5. Apabila telah disetujui oleh bagian analisis, selanjutnya data diberikan kepada bagian legal officer untuk dilakukan pengikatan kredit.
6. Setelah pihak legal officer menerima semua data yang telah disetujui oleh bagian analisis, selanjutnya bagian legal officer memeriksa kelengkapan data tersebut dan persetujuan pemberian kredit tersebut.
7. Setelah bagian legal officer memeriksa kelengkapan data tersebut dan persetujuan pemberian kredit telah disetujui, selanjutnya bagian legal officer melakukan order ke notaris sesuai dengan fasilitas dan jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank.
8. Setelah dilakukan order kepada notaris, maka dilakukanlah pengikatan kredit.
9. Setelah dilakukan pengikatan kredit, lalu dilakukanlah pemeriksaan terakhir setelah pengikatan kredit. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kredit dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, baik secara resmi dihadapan notaries yang ditunjuk BNI maupun dilakukan dibawah tangan (antara BNI dengan debitur, diikat dengan perjanjian tersendiri)
10. Kredit usaha rakyat yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta agunannya, lalu dilakukan pencairan kredit, yaitu dana tersebut dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BNI (debitur wajib membuka rekening giro atau tabungan di BNI).

## O. Penelitian terdahulu

Manik Cahyarini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Umur Piutang Untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bisma Karang Pilang Surabaya". Hasil penelitiannya Berdasarkan analisis umur piutang dapat dilihat bahwa banyak debitur yang menunggak. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan tidak dapat melakukan kebijakan kredit dengan baik. Karena tidak ditetapkan batasan hari jatuh tempo menyebabkan perusahaan debitur semakin menunda waktu pembayaran.

Imanuella Fensi da Costa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar". Hasil penelitiannya Metode analisa umur piutang dibandingkan dengan metode penghapusan langsung yang digunakan oleh perusahaan. Dari hasil perhitungan tersebut maka akan diberikan saran bagi perusahaan dalam hal penentuan beban kerugian piutangnya.

Junaidi & Cherrya (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Audit Ketaatan prosedur pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Calmic Indonesia Cabang Palembang". Hasil penelitiannya Kontrak dan survey dilapangan tidak sama, Perubahan jangka waktu pembayaran dan priode kontrak salah, Pelanggan tidak bayar tetap melanjutkan service Salah atur jangka waktu pembayaran dalam setahun sehingga terlalu tinggi bagi pelanggan, Pengurusan pemesanan pembelian dan surat perintah kerja terlambat dari pelanggan Ketidaklengkapan administrative selain kontrak Kurangnya pemahaman kepada pelanggan tentang pembayaran dimuka untuk PT. Calmic Indonesia Cabang Palembang.

Erdi Kurniawan Syahputera & Siti Khairani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Piutang tak tertagih pada PT. Bima Finance Palembang”. Hasil penelitiannya PT. Calmic Bima Finance Palembang memiliki permasalahan pada piutang usaha atau adanya penunggakan piutang, hal ini terjadi karena konsumen melakukan penunggakan pembayaran yang melebihi 30 hari dari tanggal jatuh tempo untuk pembayaran angsuran kredit mobilnya. Kondisi piutang yang tidak tertagih pada perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar.

Anny Widiasmara (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penegndalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Pt. Wahanaottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun”. Hasil penelitiannya Prosedur penegndalian intern terhadap piutang usaha pada PT.WOM Finance, Tbk cabang Madiun berjalan cukup efektif. Pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai dengan job description masing-masing. Tingkat piutang tak tertagih cabang madiun menunjukkan perbaikan dengan total piutang tak tertagih tahun 2013 sebesar 3.58%, piutang yang dapat ditagih selama periode 2013 sebesar 96.42%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya pengendalian intern terhadap piutang usaha, kualitas booking AR dan kualitas penagihan mengalami perbaikan terus menerus sehingga dapat meminimalkan piutang tak tertagihnya dan hasil membukukan profit sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Drs. Sudarmo, M.M (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Audit Kepatuhan Terhadap Standard Operating Procedure (SOP)

Fortune Club pada PT. Lestari Entertainment”. Hasil penelitiannya Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun simpulan dari audit kepatuhan terhadap standard operating procedure (SOP) fortune club pada PT. Lestari Entertainment. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Fortune Club pada PT. Lestari Entertainment dilakukan dengan bantuan dari manajer Fortune Club. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi maka disimpulkan bahwa paling banyak pelanggaran terjadi terhadap jadwal kerja sebanyak 6 kasus. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai dan melakukan pelanggaran berupa pemotongan Service Charge karyawan sebesar 50%- 100% sesuai surat peringatan yang diberikan.

Ronald David A. Irot, Herman Karamoy dan Lidia Mawikere (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado”. Hasil penelitiannya Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, Audit kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2.5 tahun terakhir. Perangkat audit kepatuhan C2R (Credit Compliance Review) yang dilakukan dalam proses pemberian kredit dapat memitigasi risiko pada awal pada awal pemberian kredit, sehingga kerugian financial ketika kualitas kredit memburuk dapat dihindari. Terdapat beberapa situasi dan kondisi yang tidak dapat

dimitigasi oleh perangkat audit kepatuhan C2R yang berdampak pada kerugian financial pada saat kualitas kredit yang diberikan memburuk.

Putu Sanjita Dewi & Dewa Nyoman Wiratmaja (2016) dalam penelitiannya “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pengendalian Intern Pada Efektivitas Usaha Simpan Pinjam Di Kota Denpasar”. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis Variabel penilaian risiko serta informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan pada efektivitas usaha sedangkan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan pada efektivitas usaha. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya peran badan pengawas dalam mengawasi atau memantau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam di kota Denpasar yang didukung dengan kurangnya kemampuan serta keahlian dari sumber daya manusia atau karyawan dalam melakukan pengelolaan koperasi simpan pinjam.

Bagus Aditya Ardhi Surono, Sri Mangesti Rahayu & Zahroh Z.A (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan CV Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012-2014)”. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun simpulannya yaitu Standar kredit yang diterapkan perusahaan CV Walet Sumber Barokah ini khusus pada pelanggan tetap perusahaan yang bekerja sama selama 8 tahun dan pelanggan yang membeli hasil produksi perusahaan lebih dari 2500 meter. Penjualan secara kredit setiap tahun perusahaan CV Walet Sumber Barokah selama periode 2012 sampai dengan periode 2014 diikuti juga penumpukan piutang usaha. Penumpukan pada piutang usaha dapat perusahaan ini menunjukkan kurangnya

keefektifan dalam pengelolaan piutang usaha dapat menghambat perolehan dari rasio profibilitas perusahaan.

Tabel 2.1

## PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Imanuella Fensi da Costa (2015)(Jurnal EMBA vol.3 No.1 maret 2015)	Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar	Metode Kuantitatif.	Metode analisa umur piutang dibandingkan dengan metode penghapusan langsung yang digunakan oleh perusahaan. Dari hasil perhitungan tersebut maka akan diberikan saran bagi perusahaan dalam hal penentuan beban kerugian piutangnya.
2	Manik Cahyarini (2015) (Cendekia Akuntansi Vol.3 No. 3 September 2015)	Analisis Umur Piutang Untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada PT. Bisma Karang Pilang Surabaya	Metode Analisis deskriptif kuantitatif	Berdasarkan analisis umur piutang dapat dilihat bahwa banyak debitur yang menunggak. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan tidak dapat melakukan kebijakan kredit dengan baik. Karena tidak ditetapkan batasan hari jatuh tempo menyebabkan perusahaan debitur semakin menunda waktu pembayaran.
3	Junaidi & Cherrya (2012) (jurnal STIE MDP jurusan akuntansi hal 1-9)	Audit Ketaatan prosedur pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Calmic Indonesia Cabang Palembang	Metode Analisis deskriptif kualitatif	Kontrak dan survey dilapangan tidak sama. Perubahan jangka waktu pembayaran dan priode kontrak salahPelanggan tidak bayar tetappmelanjutkan serviceSalah atur jangka waktu pembayaran dalam setahun sehingga terlalu tinggi bagi pelanggan, Pengurusan pemesanan pembelian dan surat perintah kerja terlambat dari pelanggan.Ketidaklengkapan administrative selain kontrak. Kurangnya pemahaman kepada pelanggan tentang pembayaran dimuka untuk PT. Calmic Indonesia Cabang Palembang



No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Erdi Kurniawan Syahputera & Siti Khairani (2012)(jurnal STIE MDP jurusan Akuntansi Hal 1-9)	Analisis Piutang tak tertagih pada PT. Bima Finance Palembang	Metode Deskriptif kualitatif	PT. Calmic Bima Finance Palembang memiliki permasalahan pada piutang usaha atau adanya penunggakan piutang, hal ini terjadi karena konsumen melakuakn penunggakan pembayaran yang melebihi 30 hari dari tanggal jatuh tempo untuk pembayaran angsuran kredit mobilnya. Kondisi piutang yang tidak tertagih pada perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar.
5	Anny Widiasmara (2014) (jurnal STIE Dharma)	Analisis Penegndalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Pt. Wahanaottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun	Metode Deskriptif Kualitatif	Prosedur penegndalian intern terhadap piutang usaha pada PT.WOM Finance, Tbk cabang Madiun berjalan cukup efektif. Pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai dengan job description masing-masing. Tingkat piutang tak tertagih cabang madiun menunjukkan perbaikan dengan total piutang tak tertagih tahun 2013 sebesar 3.58%, piutang yang dapat ditagih selama periode 2013 sebesar 96.42%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya pengendalian intern terhadap piutang usaha, kualitas booking AR dan kualitas penagihan mengalami perbaikan terus menerus sehingga dapat meminimalkan piutang tak tertagihnya dan hasil membukukan profit sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Lukiento Cahyadi, SE, MM (2014) (jurnal ilmiah Accounting Change , Volume 2 No.2. 31-39)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi	Metode Kualitatif deskriptif	<p>Pada sistem dan prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh pihak PT. BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi masih terdapat beberapa hal yang kurang sesuai yaitu adanya beberapa pada staf bagian tertentu yang belum terisi yang disebabkan karena kurangnya personel/ karyawan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya (Surprised Auditor) pemeriksaan mendadak untuk memeriksa semua data- data yang dibuat oleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan agar setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak. Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit pada PT BPR NBP 18 Cabang Tebing Tinggi yang mengacu pada aspek- aspek pengendalian kredit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal yang kompeten dan dapat dipercaya.</li> <li>2. Pemisahan tugas yang memadai.</li> <li>3. Prosedur otorisasi yang tepat.</li> <li>4. Dokumen dan catatan yang memadai.</li> <li>5. Control fisik aktiva dan catatan.</li> <li>6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen.</li> </ol>
7	Drs. Sudarmo, M.M (2014) (Ganesha	Audit Kepatuhan Terhadap Standard Operating	Metode Kualitatif deskriptif .	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun simpulan dari audit kepatuhan terhadap standard operating procedure (SOP)

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Triadi Pratama. Binus University)	Procedure (SOP) Fortune Club pada PT. Lestari Entertainment		<p>fortune club pada PT. Lestari Entertainment.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Fortune Club pada PT. Lestari Entertainment dilakukan dengan bantuan dari manajer Fortune Club.</li> <li>2. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi maka disimpulkan bahwa paling banyak pelanggaran terjadi terhadap jadwal kerja sebanyak 6 kasus. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang lalai dan melakukan pelanggaran berupa pemotongan Service Charge karyawan sebesar 50%- 100% sesuai surat peringatan yang diberikan.</li> </ol>
8	Ronald David A. Irot, Herman Karamoy dan Lidia Mawikere (2013) (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat. Volume 4 Nomer 2.)	Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado	Metode Kualitatif deskriptif	<p>Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,</li> <li>2. Sentra Kredit Menengah Manado, dimana dengan adanya audit kepatuhan dapat mengurangi risiko kredit hal ini dapat dilihat dari nilai kualitas kredit yang diberikan selama 2.5 tahun terakhir</li> </ol>

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>3. Perangkat audit kepatuhan C2R (Credit Compliance Review) yang dilakukan dalam proses pemberian kredit dapat memitigasi risiko pada awal pemberian kredit, sehingga kerugian financial ketika kualitas kredit memburuk dapat dihindari. Terdapat beberapa situasi dan kondisi yang tidak dapat dimitigasi oleh perangkat audit kepatuhan C2R yang berdampak pada kerugian financial pada saat kualitas kredit yang diberikan memburuk.</p>
9	Putu Sanjita Dewi & Dewa Nyoman Wiratmaja (2016) (E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 16.1 Juli (2016): 501-526)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pengendalian Intern Pada Efektivitas Usaha Simpan Pinjam Di Kota Denpasar	Metode Deskriptif Kualitatif	Variabel penilaian risiko serta informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan pada efektivitas usaha sedangkan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan pada efektivitas usaha. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya peran badan pengawas dalam mengawasi atau memantau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam di kota Denpasar yang didukung dengan kurangnya kemampuan serta keahlian dari sumber daya manusia atau karyawan dalam melakukan pengelolaan koperasi simpan pinjam.

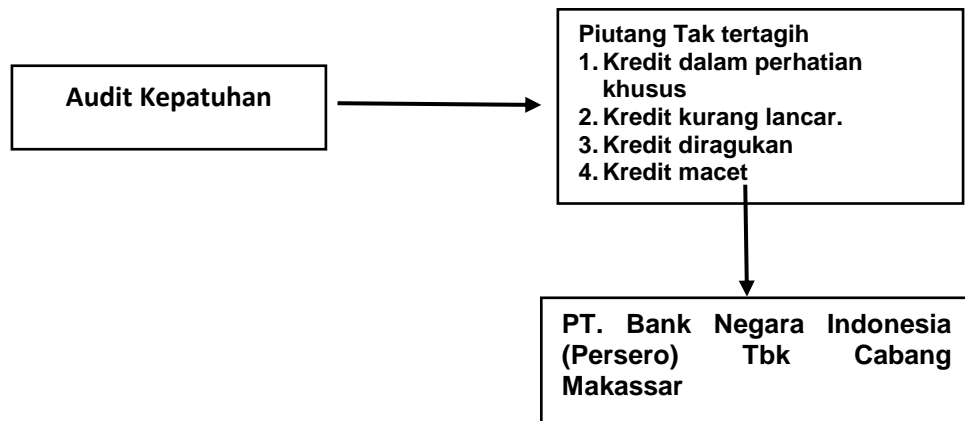
No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10	Bagus Aditiya Ardhi Surono, Sri Mangesti Rahayu & Zahroh Z.A (2015) (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol 28 No. 1)	Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan CV Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012- 2014)	Metode Deskriptif Kualitatif	Standar kredit yang diterapkan perusahaan CV Walet Sumber Barokah ini khusus pada pelanggan tetap perusahaan yang bekerja sama selama 8 tahun dan pelanggan yang membeli hasil produksi perusahaan lebih dari 2500 meter. Penjualan secara kredit setiap tahun perusahaan CV Walet Sumber Barokah selama periode 2012 sampai dengan periode 2014 diikuti juga penumpukan piutang usaha. Penumpukan pada piutang usaha dapat perusahaan ini menunjukkan kurangnya keefektifan dalam pengelolaan piutang usaha dapat menghambat perolehan dari rasio profitabilitas perusahaan.

#### P. Kerangka Konsep

Piutang tak tertagih merupakan masalah yang dialami oleh semua lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman akibat dari suatu akad perjanjian dan tidak mungkin untuk menghilangkan masalah ini.

Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dari yang meliputi kegiatan penyaluran kredit tersebut telah sesuai dengan prosedur-prosedur pemberian kredit maka perlu dilakukan audit kepatuhan/ketaatan. Audit kepatuhan/ketaatan ini sendiri berfungsi untuk menilai apakah kegiatan pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan dipatuhinya semua prosedur dari tata cara sistem pemberian kredit tersebut maka akan dapat menghindarkan dari

kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun terjadinya kredit macet yang hingga sampai saat ini masih sering terjadi.



**Gambar 2.1**

**KERANGKA KONSEP**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi, juga bisa bersifat komperatif dan korelatif.

Peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan Audit Kepatuhan dalam pengelolaan piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dimulai dengan mengamati, menelusuri dan mengumpulkan serta menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan secara detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dari hasil yang jelas. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus dan menggunakan jenis penelitian deskriptif maka dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Audit Kepatuhan dalam pengelolaan piutang untuk meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar, apakah audit kepatuhan telah berfungsi dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada perusahaan.

### **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu selama 2 bulan dimulai sejak bulan April sampai bulan Juni 2018 atau setelah seminar proposal dilaksanakan. Dan penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya dengan cara pemberian kredit.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu :

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data mentah yang perlu diolah lagi, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa catatan dan dokumen yang diperoleh langsung dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penunjang bagi penyusunan penelitian ini diperoleh dari informasi berupa buku, internet, *literature* lain atau data yang sudah ada seperti audit kepatuhan piutang tak tertagih yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya.



## E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan telaah atas data-data sekunder teknik observasi (pengamatan) dan teknik wawancara (*Interview*). Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan keadaan perusahaan, serta kegiatan dilakukan perusahaan.

### 2. Penelitian lapangan

#### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tentang audit kepatuhan pengelolaan piutang melalui pengamatan langsung, tanpa alat-alat tertentu untuk keperluan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan data yang dikumpulkan melalui interaksi secara langsung dari responden dengan mengadakan Tanya jawab guna memperoleh data yang diperlukan terutama kepada bagian Audit Internal perusahaan karena berhubungan dengan Audit pengelolaan piutang dalam meminimalkan piutang tak tertagih.

#### c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan dari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Jadi instrument penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan dibantu oleh beberapa alat yaitu kamera, buku, jurnal, serta beberapa dokumen.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang telah diperoleh peneliti dari teknik dokumentasi dan wawancara selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap data tersebut. Dimana peneliti mengamati dan memeriksa audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang tersebut dan memberikan saran kepada pihak perusahaan. Tahap akhir dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan sebagai hasil penelitian. Dalam menyimpulkan data, peneliti telah melalui berbagai tahapan tanpa melewatkan berbagai hal dari tahapan tersebut. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan data dari hasil penelitian mengenai Audit kepatuhan pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar**

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank Sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandate untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No.17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1964.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No.1A.

BNI merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan public setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industry perbankan nasional, BNI

melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestic dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total asset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan financial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpangan dana maupun fasilitas pinjaman baik segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi BNI

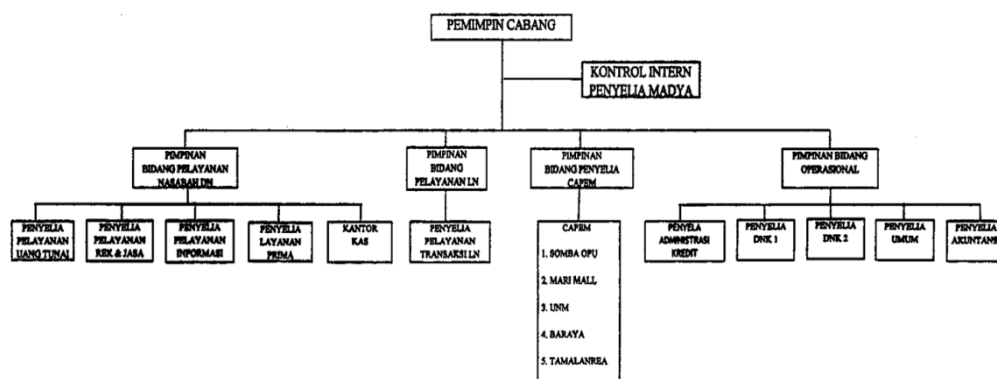
Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja

### b. Misi BNI

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan konsisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industry.

## 3. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### Cabang Makassar



Sumber : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar

Gambar 4.2  
Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar

#### 4. Uraian Tugas

Perangkat organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dengan fungsi-fungsi pokok adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Wilayah

Melakukan supervise langsung pada unit-unit *control intern*, wakil pemimpin Bidang Pembinaan Cabang, Kelompok Pengendalian Risiko Kredit, kelompok pengelolaan kredit khusus, pengelolaan pemasaran bisnis kelompok penunjang dan bagian Umum.

b. Wakil Pemimpin Bidang Pembinaan Cabang (WPC)

Melakukan supervisi langsung kepada staf pengembangan Ritel (SPR) pengelolaan sentra pemrosesan bisnis dan pengelolaan supervise Cabang, dengan fungsi pokok:

1. Membantu mengembangkan bisnis Cabang dalam melakukan aktivitas bisnis ritel
2. Melakukan *business assistance* kepada nasabah cabang (ritel) agar dapat menjalankan usahanya dengan optimal bersama dengan BNI.
3. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pemasaran ritel.

c. Kelompok Pengelolaan Kredit Khusus

Melakukan supervisi dan koordinasi unit pengelolaan kredit bermasalah dan pengelolaan kredit macet, dengan fungsi pokok:

1. Melakukan analisa terhadap kredit golongan lancar yang akan di restrukturasi.

2. Mengelola penyelamatan kredit *Non Performing Loan* (NPL) yang masih mempunyai prospek usaha dan telah di restrukturisasi.
  3. Mengelola penyelesaian kredit hapus buku dan proses penyelamatan kredit-kredit macet.
  4. Melakukan penilaian aspek hukum hubungan antara pihak bank dengan debitur.
  5. Mengelolah laporan keuangan nasabah.
- d. Kelompok Pengendalian Risiko Kredit
- Melakukan supervise dan koordinasi unit Bagian Adminisitrasi Kredit dan Pengelolaan Analisa Kredit dengan fungsi pokok:
1. Memantau mutu/kualitas kredit da mempersiapkan laporan tentang nasabah.
  2. Menyiapkan dan memastikan pelaksanaan dokumentasi nasabah segmen *middle market*.
  3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan penyedia jasa Notaris terkait dengan yuridis jaminan dan pengikatannya.
  4. Menyusun laporan perkreditan
  5. Melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diserahkan dari unit pemasaran.
  6. Menganalisa berbagai aspek penilaian kredit untuk menilai kelayakan usaha dan keuangan, menghitung kebutuhan fasilitas dan kecukupan jaminan.
  7. Mengelola/ memelihara informasi nasabah baik intern maupun ekstern

e. Pengelolaan Pemasaran Bisnis, dengan Fungsi Poko

1. Melakukan penghimpunan dana serta memasarkannya pada sector-sektor prospektif secara optimal.
2. Membina hubungan, mencari peluang dan menganalisis potensi (*wallet sizing*) menganalisis tingkat risiko hubungan dengan debitur/calon debitur.
3. Mengkoordinir perencanaan pemasaran produk kredit dan non kredit
4. Mengelola informasi perkembangan pasar, penelitian dan analisis prospek produk/jasa Bank BNI pada Wilayah.
5. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitur/calon debitur *middle market* untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok pengendalian risiko kredit.
6. Merekomendasikan permohonan kredit debitur/calon debitur sesuai sistem perkreditan Bank BNI.
7. Memantau perjalanan proses kredit debitur.
8. Membantu cabang dalam menyelesaikan masalah-masalah kredit *middle market*.

f. Kelompok penunjang

Melakukan supervise dan koordinasi pada unit-unit pengelolaan jasa keuangan (JKW), logistic & Material (LMW), pengelolaan SDM, keuangan intern (KUW), Hukum (HKW) dan Teknologi (TNW) dengan fungsi pokok:

1. Memberikan jasa konsultasi dan jasa pelayanan dalam upaya peningkatan./eebased income.



2. Mengkordinasikan dan mengolah hubungan jasa pelayanan yang terkait dengan instansi pemerintah/swasta serta mencari cara mengupayakan return yang optimal.
3. Mengelolah promosi produk Bank BNI *Corporate* Wilayah dan Cabang.
4. Mengelolah kebijakan Wilayah, pengendalian likuiditas/nostro dan transaksi pasar uang dan valuta asing.
5. Mengelolah hubungan dengan nasabah BUMN, lembaga keuangan dan perusahaan afiliasi.
6. Mengelolah urusan logistic untuk keperluan Cabang.
7. Mengelolah dokumentasi property Bank BNI dilingkungan Wilayahnya.
8. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SDM untuk Wilayah dan Cabang.
9. Mengkordinir dan memantau pelaksanaan budaya kerja, pengendalian mutu terpadu dan gugus kendali mutu di Wilayah dan Cabang.
10. Mengkordinasi pengelolaan anggaran dan penyusunan *bussines plan* Cabang dan Wilayah.
11. Mengelolah pelaksanaan sistem dan prosedur perkreditan Cabang dan Wilayah.
12. Memberikan pelayanan konsultasi hukum non-kredit, penyidik kasus-kasus dan penyimpangan lainnya.
13. Memberikan dukungan implementasi sistem aplikasi teknologi Wilayah dan Cabang

- g. Control Intern, dengan fungsi pokok :
1. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di unit-unit Kantor Wilayah suda sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan.
  2. Memantau tindak lanjut hasil audit pada Kantor Wilayah.
  3. Mengelolah seluruh Buku Pedoman Perusahaan di Kantor Wilayah.
- h. Bagian Umum dengan fungsi pokok mengelolah masalah kepegawaian, logistic, administrasi umum Kantor Wilayah.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Kebijakan Akuntansi Pelaksanaan Audit Kepatuhan**

Audit kepatuhan adalah suatu audit untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam proses kredit sudah mematuhi standard atau prosedur yang ditetapkan bank BNI dan peraturan eksternal seperti Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah. Audit kepatuhan dapat menciptakan industry perbankan yang sehat, Fungsi kepatuhan adalah suatu fungsi yang memastikan bahwa kredit yang dikomitekan telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, audit kepatuhan memperbaiki kualitas kredit khususnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar karena dengan audit kepatuhan ada beberapa risiko yang dimitigasi dari awal.

Waktu yang diperlukan dalam proses audit kepatuhan khususnya sebelum kredit dicairkan sangat tergantung dari pengalaman yang dimiliki oleh pegawai yang melakukan dan wawasan beliau dalam mengetahui dan mengaplikasikan pedoman bank BNI dan peraturan Bank Indonesia. Saat ini

waktu yang diperlukan untuk melakukan audit kepatuhan cukup, sehingga kepentingan bisnis dapat tercapai tanpa mengorbankan kepatuhan.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum dan kebijakan intern Bank

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar telah mempunyai suatu perangkat audit kepatuhan yang dinamakan *Credit Compliance Review (C2R)* yang berfungsi untuk memastikan bahwa risiko ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan piutang dapat diketahui sebelum suatu fasilitas kredit dikomitekan sehingga kerugian *financial* akibat ketidakpatuhan dapat diatasi dari awal sejak sebelum pemberian kredit dengan menggunakan aturan-aturan yang sifatnya mengikat, dengan melihat prosedur yang diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dimulai dari calon debitur mengajukan permohonan kredit tertulis, pihak marketing memeriksa kelengkapan berkas nasabah, apabila telah disetujui oleh bagian analisis kredit, selanjutnya bagian *legal officer* memberikan semua data pemberian kredit telah disetujui kepada notaris untuk dibuatkan pengikatan kredit beserta agunannya untuk ditandatangani antara pihak bank dan nasabah. Dengan adanya pengikatan secara mengikat kepada pihak nasabah mampu mengurangi resiko terjadinya piutang yang tak tertagih.

Direktur kepatuhan dengan dibantu Group Kepatuhan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menciptakan budaya kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Group Manajemen Risiko dalam mengelolah Risiko Kepatuhan.
2. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan maupun perundang-undangan dari Pemerintah maupun Regulator yang terbaru kepada seluruh Unit di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
3. Memastikan kepatuhan Bank terhadap Komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang.
4. Pengkajian rencana penerapan regulasi terbaru yang terkait kegiatan usaha Bank.
5. Pengkajian program Aplikasi APU dan PPT dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Pembinaan melalui memorandum dan pemberian opini kepatuhan terhadap penerapan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional.
7. Pemantauan rutin terhadap pelaporan yang wajib disampaikan kepada regulator untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kewajiban pelaporan.
8. Pengkajian/pemberian opini kepatuhan terhadap pengajuan fasilitas kredit/pembiayaan dengan nilai nominal tertentu.
9. Memberikan masukan dan kajian kepada anggota Direksi lainnya.
10. Menetapkan sasaran strategis dan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam rencana kerja kepatuhan dan rencana bisnis bank antara lain melalui program-program pelatihan dengan melibatkan group terkait.
11. Melakukan pemantauan/monitoring atas profil dan transaksi nasabah

12. Menciptakan keselarasan antara kebijakan dan prosedur Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
13. Memberikan arahan dalam melakukan pengkinian buku pedoman / SOP internal Bank.
14. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan kepatuhan dalam rencana kerja tahunan dan rencana bisnis bank.

**b. Prosedur Pemberian Kredit**

Risiko ketidakpatuhan dapat diidentifikasi pada awal kredit sehingga kerugian kerugian financial dapat dihindari, misalnya pemberian fasilitas kredit yang dilarang oleh pemerintah. Ketiadaan pedoman atau lambatnya *up date* akan sangat berpengaruh pada unit kepatuhan.

Berbagai tindakan dan langkah yang telah dilakukan mampu menciptakan budaya kepatuhan yang bisa direalisasikan pada setiap unit kerja Bank sehingga keseragaman dalam pemahaman terhadap ketentuan internal dan eksternal dapat berjalan dengan baik.

Prosedur pemberian Kredit yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar

1. Calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit tertulis untuk memperoleh kredit usaha rakyat kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dengan dilengkapi persyaratan – persyaratan yang diperlukan seperti riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, dan jaminan kredit.
2. Marketing meneliti kelengkapan dokumen nasabah yang telah diajukan kepada pihak bank untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan perlengkapan dan sudah benar. Atas dasar

permohonan tersebut, bagian marketing melakukan survey atau mencari informasi tentang calon debitur, baik dengan melakukan peninjauan langsung ketempat tinggal atau ketempat usaha dengan tujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada sesuai dengan yang ditulis diproposal. Setelah dilakukan survey tersebut, kembali dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

3. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, lalu dimasukkan aplikasi ke bagian analisis agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar. Dalam tahap ini telah didapat kesimpulan pokok dari analisa kredit yang merupakan suatu pendapat dan saran.
4. Disetujui atau ditolaknya permohonan atas kredit diputuskan oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar atas dasar hasil aplikasi yang disampaikan dengan didukung oleh analisa atas data yang ada di BNI.
5. Apabila telah disetujui oleh bagian analisis, selanjutnya data diberikan kepada bagian legal officer untuk dilakukan pengikatan kredit.
6. Setelah pihak legal officer menerima semua data yang telah disetujui oleh bagian analisis, selanjutnya bagian legal officer memeriksa kelengkapan data tersebut dan persetujuan pemberian kredit tersebut.
7. Setelah bagian legal officer memeriksa kelengkapan data tersebut dan persetujuan pemberian kredit telah disetujui, selanjutnya bagian legal officer melakukan order ke notaris sesuai dengan fasilitas dan jumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank.

8. Setelah dilakukan order kepada notaris, maka dilakukanlah pengikatan kredit.
9. Setelah dilakukan pengikatan kredit, lalu dilakukanlah pemeriksaan terakhir setelah pengikatan kredit. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kredit dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan, baik secara resmi dihadapan notaries yang ditunjuk BNI maupun dilakukan dibawah tangan (antara BNI dengan debitur, diikat dengan perjanjian tersendiri)
10. Kredit usaha rakyat yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta agunannya, lalu dilakukan pencairan kredit, yaitu dana tersebut dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BJI (debitur wajib membuka rekening giro atau tabungan di BNI).

**c. Prosedur Pengelolaan piutang**

Pengelolaan piutang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar melakukan pengklasifikasian, yaitu dengan status kolektibilitas Lancar yang merupakan status kolektibilitas tertinggi dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela). Status kolektibilitas dalam perhatian khusus merupakan status kolektibilitas yang ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo atau 1-2 bulan lamanya, ketika terjadi hal tersebut maka pihak Bank melakukan penagihan biasa atau melaksanakan restruksi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Status Kolektibilitas kurang lancar merupakan status kolektibilitas debitur yang lambat membayar lebih dari 60 hari

sejak jatuh tempo bulannya sampai sekurang-kurangnya 120 hari atau selambat-lambatnya 3-4 bulan lamanya, ketika terjadi hal demikian pihak bank mengeluarkan Surat peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan administrasi pembukuan. Status kolektibilitas diragukan yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan keatas, ketika terjadi hal demikian pihak bank melakukan pelelangan agunan dan mengeluarkan SP 2 kepada nasabah. Status kolektibilitas Macet tergolong *Non-Performing Limit* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melakukan melelang agunan. Kemudian hasil dari penjualan bank hanya mengambil uang pokonya saja, selebihnya dikembalikan kepada nasabah.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih mendalam untuk itu Bank BNI telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) yang berfungsi membatasi risiko konsentrasi pinjaman setiap sector ekonomi dan masing-masing segmen, dan menjadi pedoman ekspansi pinjaman.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar melakukan Follow up terhadap piutang yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, perusahaan memberikan pengendalian piutang yang baik dan benar serta dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala.

Dari hasil wawancara dengan bapak Moh Robani dan memberikan beberapa pertanyaan dengan ICQ penulis dapat menganalisa bahwa *Internal Control* atas kegiatan pengelolaan piutang sudah cukup baik karena telah memiliki sebuah pedoman tentang pengelolaan piutang. Hal ini akan memudahkan dalam



melakukan kegiatannya, di dukung oleh penempatan bagian pengelolaan piutang sesuai dengan kemampuannya agar setiap piutang yang ada dapat dianalisis dengan baik.

Sistem pengarsipan dokumen dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan karyawan dalam mencari data-data mengenai Nasabah debitur yang ditanganinya. *Internal Control* untuk proses pemberian kredit yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar juga sudah baik. Setiap pencairan dana yang diberikan telah melalui prosedur yang ditetapkan dan analisis yang dilakukan mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen debitur serta peninjauan langsung kepada debitur. Pembuatan kartu piutang dan pencatatan dilakukan secara bergilir perkiraan piutang pelanggan diteliti sejak awal sehingga meminimalisir risiko piutang tak tertagih ketika terjadi perselisihan dengan nasabah ditangani langsung oleh bagian kredit, kejadian seperti ini jarang terjadi karena sudah di ikat oleh perjanjian sebelumnya yang telah ditandatangani oleh nasabah itu sendiri. Semua dokumen diarsipkan dengan baik.

#### **d. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan atas Pengelolaan Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih**

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil pembahasan dari peneliti yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar sangat penting diadakan audit kepatuhan pelaksanaan terhadap pengelolaan piutang yang berfungsi untuk mengurangi risiko-risiko baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar telah mempunyai suatu perangkat audit kepatuhan yang dinamakan *Credit Compliance Review (C2R)* yang berfungsi untuk memastikan bahwa risiko ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan piutang dapat diketahui sebelum suatu fasilitas kredit dikomitekan sehingga kerugian *financial* akibat ketidakpatuhan dapat diatasi dari awal sejak sebelum pemberian kredit dengan menggunakan aturan-aturan yang sifatnya mengikat.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar dalam proses pemberian kredit telah dilakukan oleh *Regional Compliance Group*, hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomer 13/2/PBI/2011 tanggal 12 januari 2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilihat sebagai dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar telah mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank, termasuk dalam pengelolaan piutang, telah mengelolah risiko kepatuhan, telah memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar mulai dari sejak awal pemberian kredit sampai setelah pencairan kredit, dilakukan pengarsipan yang secara sistematis sehingga mendukung bukti yang memadai ketika Kantor akuntan Publik datang melakukan pemeriksaan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar juga telah memiliki sebuah pedoman sehingga memudahkan dalam pekerjaannya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank selalu memeriksa kondisi dari Debiturnya, memantau aktivitas penggunaan dana yang dilakukan oleh Debitur, serta memberikan pembinaan. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *Officer* bank segera melakukan tindakan seperti turun langsung ke lapangan menemui Nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami Nasabah, kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah kepada Nasabah.

Pengendalian terhadap piutang dapat menjamin manajemen perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai, Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anny Widiasmara (2014) bahwa dengan dilakukannya pengendalian intern terhadap piutang usaha dan kualitas perbaikan terus menerus serta membukukan profit sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan ini dinilai mampu meminimalkan piutang tak tertagih hal ini sejalan dengan yang terjadi pada PT Bank Negara Indonesia dengan melaksanakan fungsi audit kepatuhan dalam pengelolaan piutang, yaitu dapat dilihat dari awal pemberian kredit sampai diberikannya kredit kepada nasabah serta dalam pengelolaannya dilakukan secara sistematis sesuai dengan pedoman perusahaan dapat meminimalisir piutang tak tertagih. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik Cahyarini (2015) pihak perusahaan tidak dapat melakukan kebijakan kredit dengan baik dengan tidak menetapkan batasan hari jatuh tempo menyebabkan perusahaan debitur semakin menunda pembayarannya dan terjadilah penunggakan pembayaran.

Jadi, kesuksesan suatu usaha kredit yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung oleh suatu regulasi yang baik agar dalam menjalankan usahanya sudah memiliki pedoman. Namun, regulasi yang telah disusun dengan baik oleh perusahaan tidak akan bermakna apabila pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan usaha tidak dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga antara keduanya haruslah sejalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Audit Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik karena memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mengenai pengelolaan piutang pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar sudah sesuai dengan standar

operasional perusahaan yaitu mengambil keputusan mengenai standar kredit seorang pemohon dengan mengikuti prosedur pemberian kredit, kemudian memberikan syarat kredit dengan menetapkan periode dimana kredit diberikan setelah itu melakukan follow up terhadap nasabah agar menghindari resiko piutang tak tertagih.

Maka dari itu Penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Audit kepatuhan pengelolaan piutang dapat berfungsi efektif dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar hal dapat dilihat ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan undang-undang sudah sesuai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan pengamatan yang penulis lakukan. Berikut ini beberapa saran dari penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Grup Kepatuhan melakukan sentralisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lainnya khususnya ketentuan regulasi baru untuk dimonitor apakah ada ketentuan baru terkait dengan benturan kepentingan.
2. Dewan Komisaris menyelenggarakan pelatihan/workshop bagi Komite-komite untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Komponen-komponen dalam perangkat audit kepatuhan dibuat dalam sistem computer online sehingga jika terdapat perubahan ketentuan baik

peraturan internal bank BNI dan peraturan eksternal dari otoritas yang berwenang khususnya peraturan Bank Indonesia dapat dengan cepat terupdate keseluruhan unit kepatuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Anny Widiastara. 2014. Analisis Penegndalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Pada Pt. Wahanaottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun. *jurnal STIE Dharma Iswara Madiun* Volume 10, Nomor 2, juni 2014
- Cahyarini M. 2015. Analisis Umur Piutang Untuk Meminimalisir Piutang Tak Tergih Pada PT. Bisma Karang Pilang Surabaya. *Cendekia Akuntansi* Vol.3 No. 3 September 2015
- Costa, F. D. 2015. Analisis Kerugian Piutang Tak Tertagih Pada PT. Metta Karuna Jaya Makassar. *Jurnal EMBA*. vol.3 No.1 maret 2015
- Drs. Sudarmo, M.M. 2014. Audit Kepatuhan Terhadap Standard Operating Procedure (SOP) Fortune Club pada PT. Lestari Entertainment. *Ganesha Triadi Pratama*. Binus University

- Erdi Kurniawan Syahputera & Siti Khairani. 2012. Analisis Piutang tak tertagih pada PT. Bima Finance Palembang. *jurnal STIE MDP*. Jurusan Akuntansi Hal 1-9
- Haryono Jusup. 2012. Dasar-dasar Akuntansi, edisi 7 YKPN, yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaidi & Cherrya. 2012. Audit Ketaatan prosedur pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih pada PT. Calmic Indonesia Cabang Palembang. *jurnal STIE MDP* jurusan akuntansi hal 1-9
- Lukiento Cahyadi, SE, MM, 2014. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 18 Cabang Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah Accounting Change STIE Bina Karya Tebing Tinggi*. Volume 2, No.2
- Narbuko Cholid dan H. Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Peraturan menteri keuangan (No.84/PMK.012/2006)
- Rivai Veithzal, dkk. 2013. *Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ronald David A. Irot, Herman Karamoy dan Lidia Mawikere. 2013. Pelaksana Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat*. Volume 4 Nomer 2.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

**Tabel 4.1 : Poin- Poin Wawancara dan penjelasannya**



NO	PERTANYAAN	JAWABAN/ PENJELASAN
1	Apakah yang anda ketahui tentang audit kepatuhan?	Audit kepatuhan adalah suatu audit untuk memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam proses kredit sudah mematuhi standard atau prosedur yang ditetapkan bank BNI dan peraturan eksternal seperti Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah
2	Apakah fungsi kepatuhan yang anda ketahui?	Audit kepatuhan dapat menciptakan industry perbankan yang sehat, Fungsi kepatuhan adalah suatu fungsi yang memastikan bahwa kredit yang dikomitekan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, audit kepatuhan memperbaiki kualitas kredit khususnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar karena dengan audit kepatuhan ada beberapa risiko yang dimitigasi dari awal.
3	Apakah penting dilakukan adanya pelaksanaan kepatuhan terhadap pengelolaan piutang?	Penting. Jadi <i>Auditor</i> menggunakan perangkat pemeriksaan yang disebut kajian kepatuhan untuk di PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar itu sendiri telah memiliki perangkat <i>Credit Compliance Review (C2R)</i> yang berfungsi untuk memastikan bahwa risiko ketidakpatuhan dalam proses pengelolaan piutang dapat diketahui sebelum suatu fasilitas kredit dikomitekan sehingga kerugian <i>financial</i> akibat ketidakpatuhan dapat diatasi dari awal sejak sebelum pemberian kredit dengan menggunakan aturan-aturan yang sifatnya mengikat
4.	Bagaimana prosedur pemberian kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk Cabang Makassar?	Bagian pemasaran yang bertugas memprospek nasabah apabila berminat maka calon nasabah harus mengisi atau membuat surat permohonan, dan melengkapi berkas seperti KTP, KK, NPWP, sertifikat untuk jaminan (Rumah dll) dan syarat lainnya yang telah ditentukan oleh pihak bank, setelah itu bagian operasional akan mengecek berkas dan mengecek terhadap berkas yang disetorkan oleh calon nasabah, dan keputusan terakhir apakah

		diberikan kredit atau tidak yaitu pada pimpinan cabang sebagai pemberi keputusan
5	Apakah bank melakukan monitoring dan pembinaan terhadap nasabah/debitur?	Iya. Dengan cara turun langsung ke tempat nasabah jika ada permasalahan dalam bisnisnya dan memberikan solusi
6	Bagaimana klasifikasi piutang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar?	ada beberapa kolektibilitas piutang <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lancar dilihat dari nasabah tidak pernah terlambat atau diawal waktu membayar kewajibannya</li> <li>2. Dalam perhatian khusus dilihat dari lama tunggakan 1-90 hari masa jatuh tempo</li> <li>3. Kurang lancar dilihat dari lama tunggakan 91-120 hari masa jatuh tempo</li> <li>4. Diragukan dilihat dari lama tunggakan 121-180 hari</li> <li>5. Macet dilihat dari lama tunggakan &gt;180 hari</li> </ol>
7	Apa yang dilakukan bank ketika sudah masuk dalam tahap kolektibilitas ke-2 yaitu dalam perhatian khusus sehingga tidak terjadi kredit macet atau piutang tak tertagih?	Yaitu dengan melakukan follow up penagihan secara rutin tergantung kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan pihak debitur, tetapi ketika sudah diberikan penagihan dan nasabah tersebut sudah tidak memiliki l'tikat baik terhadap pelunasan piutangnya maka biasanya pihak bank mengeluarkan surat peringatan sampai surat peringatan ke 3 dan pada akhirnya jaminan yang telah diberikan kepada pihak bank disita dan dilelang untuk mengembalikan modal awal yang telah dipinjamkan
8	Apakah pernah terjadi kredit macet/ piutang tak tertagih? Apa penyebabnya?	Iya. Biasanya disebabkan karena dipecat, bangkrut, bencana alam, meninggal dunia.
9	Ketika terjadi bangkrut apakah jaminan diambil oleh bank?	Jadi jaminan dijual atau dilelang ketika ada persetujuan nasabah, kemudian hasil dari penjualan bank hanya mengambil uang pokoknya saja, selebihnya di kembalikan kepada nasabah
10	Bagaimana penyelesaian kredit macet/ piutang tak tertagih?	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penjadwalan 3R: Penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali</li> <li>b. Kalim asuransi (jika nasabah</li> </ol>

		memiliki) c. Write Off
--	--	---------------------------

**Tabel 4.2 Daftar *Internal Control Questionnaire (ICQ) Audit Kepatuhan* Pengelolaan piutang dalam meminimalisir piutang tak tertagih**

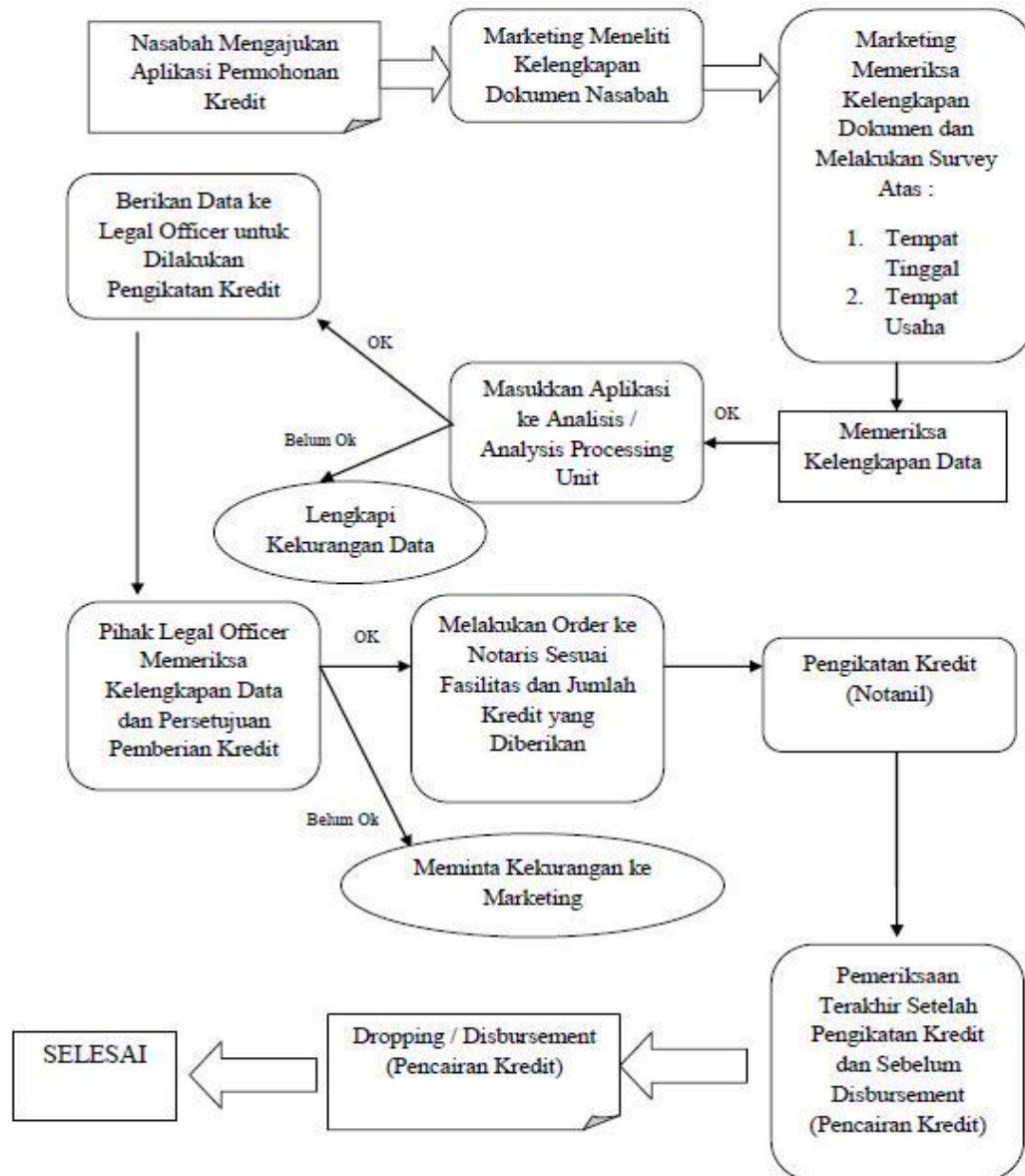
No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar telah memiliki pedoman tentang pengelolaan piutang?	✓	
2	Apakah bagian memiliki pengetahuan atau kecakapan yang sesuai dengan masing-masing tugas dan tanggung jawab?	✓	
3	Apakah terdapat pembagian wewenang untuk pemutusan pemberian Kredit?	✓	
4	Dalam memberikan wewenang apakah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar secara aktif melakukan pengidentifikasian untuk memilih nasabah-nasabah dapat dipercaya?	✓	
5	Apakah oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Makassar secara teratur atau periodik diadakan penilaian kolektibilitas para debiturnya?	✓	
6	Apakah sistem pengarsipan dari bermacam-macam dokumen yang menyangkut pemberian kredit telah diarsipkan secara sistematis?	✓	
7	Apakah pemutusan pemberian kredit didukung oleh analisa dan prosedur yang biasa dilakukan?	✓	
8	Apakah penggolongan (kolektibilitas) telah sesuai dengan ketentuan?	✓	
9	Apakah pemberian piutang yang diberikan di-cover atau ditutup dengan jaminan yang memadai?	✓	
10	Apakah perkiraan piutang nasabah telah diteliti dengan baik	✓	
11	Apakah semua piutang yang diberikan selalu dibuatkan ikatan perjanjian yang lengkap?	✓	
12	Apakah setiap perjanjian yang akan jatuh tempo telah diproses sehingga tidak ditemui adanya <i>over draft</i> ?	✓	
13	apakah suatu syarat kredit sudah menetapkan priode dimana kredit diberikan keringanan untuk pembayaran lebih awal?	✓	
14	Apakah laporan keuangan dari para Debitur selalu diaudit oleh Akuntan Publik?	✓	

15	Apakah perusahaan memiliki pedoman piutang tertulis?	✓	
16	Apakah dibuat kartu piutang? Bila "Ya" a. Apakah secara bulanan atau kwartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan Kontrol (buku besar piutang) dengan kartu piutang? b. Apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? c. Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya?	✓ ✓ ✓ ✓	
17	Apakah pencatatan dikartu piutang sering : a. Sering bergilir? b. Terpisah dari yang mengerjakan buku besar?	✓	✓
18	Apakah perkiraan piutang pelanggan secara priodik diteliti mengenai: a. Pelanggan yang sering terlambat? b. Bukti adanya salah pembeban? c. Bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian? d. Bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan	✓ ✓ ✓ ✓	
19	Apakah perusahaan mengirimkan surat konfirmasi piutang ke outlet secara priodik? Jika "Ya" apakah a. Dcocokkan dengan kartu piutang oleh orang yang tidak berhubungan dengan penerimaan uang, pengeluaran uang, dan nota kredit? b. Terkontrol atas kemungkinan diubah sebelum dikirim? c. Diposkan/dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang?	✓ ✓ ✓	
20	Apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang?	✓	
21	Apakah koreksi atas invoice dan penghapusan piutang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang?	✓	
22	Apakah bukti yang digunakan untuk penghapusan piutang selalu diamankan untuk mencegah penyalahgunaan?	✓	
23	Apakah secara priodik dibuat analisa umur piutang dan yang sudah jatuh tempo ditindaklanjuti?	✓	

24	Apakah terdapat kebijakan manajemen tentang penghapusan piutang?	✓	
25	Apakah untuk penagihan dibuatkan bukti kwitansi? Bila "Ya" apakah: a. Kwitansi tersebut memiliki nomer urut tercetak? b. Kwitansi dibuat setelah diperiksa terlebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? c. Bagian akuntansi memperhatikan urutan nomernya?	✓ ✓ ✓	
26	Apakah penerimaan berupa cek mundur/giro diberikan ke bagian akuntansi?	✓	
27	Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima?	✓	
28	Apakah pada cek mundur yang diterima telah dicantumkan nama perusahaan/klien?	✓	
29	Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur?	✓	

**Gambar 4.2**

**Flowchart Prosedur Pemberian kredit Pada PT Bank Nasional Indonesia  
(persero) tbk. Cabang Makassar**



## BIOGRAFI PENULIS



**ISMAWATI**, lahir di Sinjai pada tanggal 07 oktober 1996. Anak kedua dari pasangan Ayahanda Sakka dengan Ibunda Hikmawati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 163 Lempangan di Kabupaten Sinjai, tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Sinjai Timur tamat tahun 2011 dan dilanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Tellulimpoe tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar)”.